

**EKSISTENSI BADAN KEHORMATAN DALAM MENUNJANG  
FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

**Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Universitas Kristen Satya Wacana**

**Aprilia Hardini Sarasanti**

**NIM: 312014145**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA**

**SALATIGA**

**2017**



## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aprilia Hardini Sarasanti  
NIM : 312014145 Email : Apriliahardini18@gmail.com  
Fakultas : Hukum Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul tugas akhir : Eksistensi Badan Ketertarikan Dalam Menunjang  
Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Pembimbing : 1. Kustadi., SH. M.Hum.  
2. \_\_\_\_\_

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Kristen Satya Wacana maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Satya Wacana.

Salatiga, 14 Desember 2017.

  
  
Tanda \_\_\_\_\_ swa  
Aprilia Hardini Sarasanti





## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aprilia Hardini Sarasanti  
NIM : 36019145 Email : Apriliahardini18@gmail.com  
Fakultas : Hukum Program Studi : Umu Hukum  
Judul tugas akhir : Ekstensi Badan Ketertarikan Dalam Menunjang Fungsi  
Deputi Perwakilan Rakyat Daerah

Dengan ini saya menyerahkan hak *non-eksklusif*\* kepada Perpustakaan Universitas – Universitas Kristen Satya Wacana untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak yang sesuai):

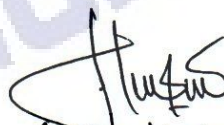
- ☒ a. Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA
- ☐ b. Saya tidak mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA\*\*

\* Hak yang tidak terbataskannya bagi satu pihak saja. Pengajar, peneliti, dan mahasiswa yang menyerahkan hak *non-eksklusif* kepada Repositori Perpustakaan Universitas saat mengumpulkan hasil karya mereka masih memiliki hak *copyright* atas karya tersebut.

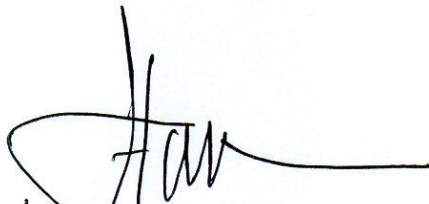
\*\* Hanya akan menampilkan halaman judul dan abstrak. Pilihan ini harus dilampiri dengan penjelasan/ alasan tertulis dari pembimbing TA dan diketahui oleh pimpinan fakultas (dekan/kaprodi).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Salatiga, 14 Desember 2017

  
Aprilia Hardini Sarasanti  
Tanda tangan & nama terang mahasiswa

Mengetahui,

  
Kurniadi, SH. M. Hum  
Tanda tangan & nama terang pembimbing I

\_\_\_\_\_  
Tanda tangan & nama terang pembimbing II

**EKSISTENSI BADAN KEHORMATAN DALAM MENUNJANG  
FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

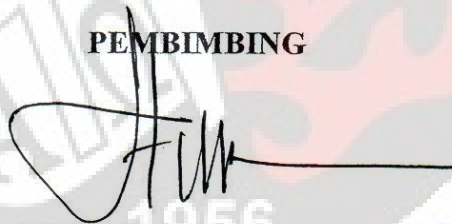
**Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Universitas Kristen Satya Wacana**

**Aprilia Hardini Sarasanti**

**NIM: 312014145**

**PEMBIMBING**



**KUSTADI, SH., M.Hum.**

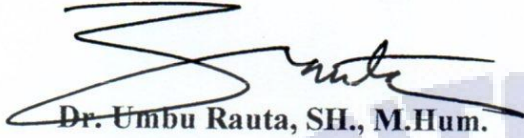
**Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga**

**2017**

**Lembar Pengujian**

**Komisi Penguji**

**Penguji I**



**Dr. Umbu Rauta, SH., M.Hum.**

**Penguji II**



**Kustadi, SH., M.Hum.**

**Penguji III**




**Tyas Tri Arsoyo SH. MH.**

**Diuji pada tanggal 8 Desember 2017**

**Mengesahkan,**

**Dekan Program Studi Ilmu Hukum**



**Arie Siswanto, SH., M.Hum.**

## MOTTO

***“Sesungguhnya bersama kesulitan itu  
ada kemudahan”***

**(QS. Al-Insyirah : 5-6)**





## Ucapan Terimakasih

Atas terselesaikannya skripsi ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum UKSW, Bapak Arie Siswanto, S.H., M.Hum.
2. Bapak Kustadi, SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini.  
Terima kasih atas bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan kepada Penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tuhan Berkati.
3. Bapak Theofransus Litaay, SH., LL.M., Ph.D. selaku Wali Studi, Terimah Kasih Saran kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan perkuliahan ini dengan baik.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UKSW, yang telah membimbing dan mendidik Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum. Serta terima kasih kepada seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum, atas bantuan yang diberikan selama perkuliahan Penulis.
5. Ibunda Sri Sedjati Wahyuni kasih sayangmu, lantunan doamu senantiasa mengiri setiap perjalanan hidupku, trimakasih Ibu. Ayahanda Trijono B.E. doa, semangat dan dorongamu yang selalu membuatku mampu menghadapi segala persoalan. Terimakasih, Penghargaan, rasa hormat dan cinta kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga dengan karya kecil ini menjadi mahakarya dan menghadirkan senyum bangga kalian.
6. Saudara-saudara tercintaku kakak Linda, Kakak Erna, Kakak Bima, Kakak icha serta Kakak Penta yang selalu membantu dan memenuhi segala kebutuhan selama masa studi. Terimakasih atas semangat yang selalu diberikan hingga terselesaikannya skripsi ini..
7. Tony Setiawan, terima kasih yang sangat mendalam atas perhatian, semangat, serta dukungannya selama proses awal studi hingga terselesaikannya skripsi ini.

8. Seluruh saudara Iparku, seluruh keponakan yang selalu menghiburku.
9. Terima kasih yang tak terhingga kepada teman-teman Angkatan 2014, terimakasih kepada Yosi, Bunga, Pouline. Trimakasih atas kebersamaannya selama awal masuk perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga kebersamaan dan persahabatan kita tetap terjalin baik. Amin.

Akhirnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih dan semoga Allah SWT membalas segalanya. Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih terhadap ilmu hukum





## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbril'alamiin, Maha Agung Allah SWT dengan segala kebesaran-Nya dan segala puji hanya untuk-Nya yang merahmati semua makhluk dengan segenap kasih dan sayang tiada henti, berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "EKSISTENSI BADAN KEHORMATAN DALAM MENUNJANG FUNGSI DPRD".

Pelaksanaan sistem demokrasi tidak langsung dalam kerangka pemerintahan daerah di Indonesia adalah melalui DPRD. Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena penyelenggaraan pemerintahan di daerah diserahkan kepada Kepala Daerah dan DPRD. Pemikiran demokrasi mengakibatkan jalannya roda pemerintahan harus sesuai dengan keinginan atau aspirasi rakyat, sesuai Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) secara tegas mengisyaratkan bahwa Indonesia mengakui kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, pemerintah yang berkuasa harus mendapatkan legitimasi atau pengakuan dari rakyat. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, legitimasi rakyat tersebut diwakilkan kepada para wakil rakyat yang duduk di DPR RI pada tingkat pusat dan DPRD pada tingkat daerah. Dalam sistem *representative democracy* atau demokrasi perwakilan memang partisipasi rakyat yang berdaulat, disalurkan melalui pemungutan suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan.

Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrument

fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan. DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah perwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat. Dengan demikian maka perilaku dari anggota DPRD mencerminkan seorang wakil rakyat, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Mengingat bahwa tidak ada lembaga yang dapat mengontrol perilaku anggota DPRD maka diperlukan adanya keberadaan Badan Kehormatan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, DPRD dilengkapi dengan alat kelengkapan dewan, yang salah satunya adalah Badan Kehormatan.

Eksistensi BK dalam penegakan kode etik sangatlah penting guna menjaga etika dan moral Anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Dalam hal ini implementasi fungsi Badan Kehormatan diartikan dengan bagaimana pelaksanaan atau penerapan fungsi Badan Kehormatan dalam penegakan kode etik di DPRD. BK berwenang untuk melaksanakan pengawasan dan kontrol terhadap DPRD. Pengawasan dan kontrol dalam hal ini adalah pengawasan kontrol internal terhadap DPRD. Anggota DPRD merupakan para wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Kode etik profesi tersebut terwujud dalam tata tertib dan kode etik DPRD. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Tata tertib sebagai aturan normatif di DPRD serta kode etik sebagai batas-batas aturan main anggota dewan. Kode Etik DPRD merupakan keberlanjutan dari Tata Tertib DPRD. Meskipun dalam kelembagaan DPRD telah dilengkapi dengan BK namun saat ini banyak hal hal buruk yang mewarnai kiprah DPRD dalam pelanggaran kode etik

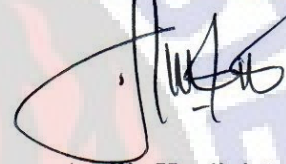
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dan merupakan jenis penelitian deskriptif analisis. Dalam hal ini penulis mencoba untuk mengetahui dan mengkaji eksistensi BK DPRD dalam menunjang fungsinya. Serta untuk mengetahui bagaimana perkembangan pengaturan mengenai eksistensi BK.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi BK sangat diperlukan. Dalam hal ini keberadaan BK merupakan hal yang sangat penting, mengingat tidak adanya lembaga lain yang berfungsi mengawasi, mengontrol serta menegakan kode etik anggota dewan. Namun, sangat disayangkan bahwa yang menjadi salah satu hambatan internal BK ini tercermin dari kelemahan para anggota BK yang juga berasal dari internal DPRD yang tentu saja memiliki kecenderungan subjektif dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangannya. Oleh karena itu eksistensi BK DPRD perlu diperkuat dengan adanya unsur dari luar DPRD untuk menjamin independensi lembaga tersebut.

Pada penelitian ini, saran yang dapat diberikan peneliti terkait dengan Eksistensi BK yakni: Bagi anggota Badan Kehormatan seyogyanya perlu adanya peningkatan pengetahuan. Bagi seorang anggota Badan Kehormatan idealnya menguasai Filsafat Politik, Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum sebagai bentuk refleksi mendalam yang memungkinkan kehidupan politik mengungkap struktur-struktur, makna, dan nilainya secara etis sehingga kesadaran akan etika dapat terwujud dengan baik.. Selain itu Dalam rangka memberi pertimbangan bagi Badan Kehormatan agar memperoleh putusan yang objektif, maka hendaknya perlu diatur adanya unsur-unsur yang melibatkan pihak-pihak lain diluar anggota DPRD itu sendiri. Sehingga

mekanisme pengawasan yang berbasis etika dapat terwujud lebih independen dan objektif. Oleh karena itu diharapkan nantinya Badan kehormatan mampu berperan tidak hanya sekadar menjadi lembaga penjaga moral dan integritas anggota DPRD melainkan juga menjadi mekanisme internal untuk menegakkan kode etik.

Salatiga, 8 Desember 2017



Aprilia Hardini Sarasanti





## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL .....	i
LEMBAR PENGUJIAN .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iii
LEMBAR HASIL UJIAN SKRIPSI .....	iv
MOTTO .....	x
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR TABEL .....	xii
ABSTRAK .....	xx
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar belakang masalah .....	1
B. Rumusan masalah .....	10
C. Tujuan penulisan .....	10
D. Manfaat penelitian .....	11
E. Metode .....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	14
A. Teori Pengawasan Terhadap Penggunaan Kekuasaan .....	14
B. Fungsi DPRD Sebagai Representasi Rakyat di Daerah .....	19
C. Kode Etik .....	21
D. Kedudukan Aparat Penegak Kode Etik .....	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....	33
A. Hasil Penelitian .....	33
1. Sejarah Pembentukan Badan Kehormatan DPRD .....	33

2. Kedudukan Badan Kehormatan Dalam Menunjang Fungsi DPRD .....	37
3. Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD .....	40
4. Perkembangan Pengaturan Hukum Badan Kehormatan .....	42
B. Analisis .....	50
1. Eksistensi Badan Kehormatan Dalam Menunjang Fungsi DPRD .....	50
2. Perkembangan Pengaturan Badan Kehormatan .....	52
BAB IV PENUTUP .....	53
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	54
DAFTAR PUSTAKA .....	56



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbandingan Pengaturan BK DPRD dalam Undang-Undang .....	36
Tabel 3.2 Perbandingan Pengaturan BK DPRD dalam Peraturan Pemerintah .....	40



## **ABSTRAK**

### **EKSISTENSI BADAN KEHORMATAN DALAM MENUNJANG FUNGSI DPRD**

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menyebutkan bahwa Badan Kehormatan merupakan salah satu alat kelengkapan dewan. Anggota DPRD Kabupaten/kota melaksanakan wewenang dan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan termasuk tentang kode etik. Kode etik anggota dewan sangat dibutuhkan, hal ini berfungsi untuk memberi batasan terhadap anggota dewan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Pentingnya eksistensi Badan Kehormatan DPRD ini menjadi dasar dilakukannya penelitian yang akan dikaji, yaitu dengan permasalahan : bagaimana eksistensi Badan Kehormatan dalam menunjang fungsi DPRD. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif maka ditemukan hasil bahwa Eksistensi Badan Kehormatan DPRD sangat dibutuhkan jika melihat pada Undang Undang Nomor 42 Tahun 2014, mengingat Badan Kehormatan merupakan lembaga yang bertugas mengawal dan menegakan kode etik para anggota dewan. Namun saat ini Badan Kehormatan belum memiliki independensi yang kuat jika dilihat dari sisi kelembagaannya. Hal ini dikarenakan anggota Badan Kehormatan merupakan bagian dari anggota DPRD itu sendiri, sehingga memiliki kecenderungan subjektif dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangannya. Oleh karena itu diharapkan dalam lembaga ini memiliki independensi yang kuat untuk dapat menunjang fungsi DPRD.

**Kata Kunci : Badan Kehormatan DPRD, Kode Etik**

